

KABUPATEN SUKOHARJO SUKSES RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECCUALIAN 9 KALI BERTURUT



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1716470648880-tws/c32pygpld66n25k.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Sukoharjo : Pemkab Sukoharjo kembali mempertahankan penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. Sukoharjo mampu meraih opini WTP sembilan kali berturut-turut sejak 2015.

Penyerahan penghargaan opini WTP dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Rabu (22/5/2024). Penghargaan opini WTP itu diterima oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani didampingi Ketua DPRD Sukoharjo, Wawan Pribadi. Selain Sukoharjo, BPK Jawa Tengah juga menyerahkan penghargaan opini WTP untuk daerah lain seperti Kota Solo.

Inspektur Daerah Sukoharjo, Abdul Haris Widodo, mengatakan penghargaan opini WTP yang diraih sembilan kali berturut-turut menjadi bukti komitmen dan profesionalitas setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah.

“Alhamdulillah, Pemkab Sukoharjo kembali meraih penghargaan opini WTP dari BPK Perwakilan Jawa Tengah. Kemarin, saya ikut mendampingi Bupati saat penyerahan penghargaan opini WTP di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah kata dia, saat dihubungi Solopos.com, Kamis (23/5/2024).

Haris, sapaan akrabnya, mengatakan ada beberapa catatan dari BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk bahan evaluasi masing-masing pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pengelolaan anggaran yang sesuai perundang-undangan. Pengawasan dalam sistem pengendalian internal harus menjadi perhatian utama masing-masing pemerintah daerah.

Selain itu, manajemen pengelolaan aset daerah dan tertib administrasi dengan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

“Catatan dari BPK Perwakilan Jawa Tengah menjadi bahan evaluasi Pemkab Sukoharjo untuk meningkatkan kinerja dalam mewujudkan good government dan good governance,” ujar dia.

Haris berharap setiap OPD di Pemkab Sukoharjo harus lebih bekerja keras dalam mengelola keuangan daerah dan aset daerah pada masa mendatang. Laporan keuangan harus disusun secara detail dan jelas sehingga Pemkab Sukoharjo bisa kembali mempertahankan penghargaan opini WTP pada 2025. (Edwi)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/709301/kabupaten-sukoharjo-sukses-raih-opini-wtp-9-kali-berturut>, “Kabupaten Sukoharjo Sukses Raih Opini WTP 9 Kali Berturut”, tanggal 23 Mei 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/mantap-sukoharjo-sukses-raih-opini-wtp-9-kali-berturut-1927138>, “Mantap! Sukoharjo Sukses Raih Opini WTP 9 Kali Berturut”, tanggal 23 Mei 2024.
3. <https://www.beritasatu.com/network/sukoharjonews/190582/pemkab-sukoharjo-kembali-raih-opini-wtp-sembilan-kali-berturut-turut>, “Pemkab Sukoharjo Kembali Raih Opini WTP, Sembilan Kali Berturut-Turut!”, tanggal 27 Mei 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*